

Ekologi Politik Pengelolaan Sampah: Konflik Negara, Masyarakat, dan Lingkungan di TPA Binuang Polewali Mandar

The Political Ecology of Waste Management: State-Community-Environment Conflicts at the Binuang Landfill, Polewali Mandar Regency

Taufiq Akbar Hidayat¹, Gustiana Kambo², Muhammad Imran³

¹ Program Sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Makassar, Universitas Hasanuddin

^{2,3} Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Makassar Universitas Hasanuddin

Corresponden Author: taufiqhidayatd125@gmail.com.

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords:</p> <p><i>Political Ecology; Environmental Justice; Power Relations; Community Resistance; Landfill Governance</i></p>	<p><i>Waste management at the Binuang Landfill has earned Polewali Mandar Regency the Adipura Award. However, waste management at the Binuang Landfill has resulted in leachate seeping into community rice fields and air pollution. This environmental pollution impacts the socio-economic aspects of the community. This study aims to analyze the impact of waste management policies at the Binuang Landfill on the environment and surrounding community using the concept of Political Ecology. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that waste management policies at the Binuang Landfill do not yet reflect the principles of sustainable and equitable political ecology. This can be observed in the environmental position in policy negotiations between the government and the community. The conflict between the government and the community focuses solely on fulfilling their respective rights without considering environmental aspects. This condition makes waste management at the landfill suboptimal, resulting in impacts that sacrifice the rights and welfare of the community around the Binuang Landfill.</i></p>

<p>Kata Kunci:</p> <p><i>Ekologi Politik; Keadilan Lingkungan; Hubungan Kekuasaan; Perlawanan Masyarakat; Tata Kelola Tempat Pembuangan Sampah</i></p> <p>How to cite :</p> <p>DOI: 10.63280/48653</p>	<p>Abstrak</p> <p>Pengelolaan sampah di TPA Binuang mengantarkan Kab. Polewali Mandar mendapatkan penghargaan Adipura. Disisi lain, pengelolaan sampah di TPA Binuang menyebabkan merembesnya air lindi ke sawah masyarakat dan polusi udara. Pencemaran lingkungan ini berpengaruh pada aspek sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Binuang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar dengan menggunakan konsep Ekologi Politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di TPA Binuang belum mencerminkan prinsip-prinsip ekologi politik yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini dapat diamati pada bagaimana posisi lingkungan dalam negosiasi kebijakan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat itu hanya berfokus pada pemenuhan hak masing-masing tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan. Kondisi ini membuat pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA tidak optimal, sehingga menimbulkan dampak yang mengorbankan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat sekitar TPA Binuang.</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Copyright © 2026 JPSD. All rights reserved.</p>
---	--

1. Pendahuluan

Pengelolaan sampah selama ini kerap diposisikan sebagai persoalan teknis dan administratif yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dasar. Fokus utama kebijakan umumnya diarahkan pada aspek operasional, seperti pengangkutan sampah, ketersediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta kepatuhan terhadap standar teknis pengelolaan limbah. Dalam banyak kasus, keberhasilan pengelolaan sampah bahkan direduksi menjadi capaian simbolik berupa penghargaan lingkungan, seperti Adipura, yang dianggap merepresentasikan tata kelola lingkungan yang baik. Namun, pendekatan semacam ini cenderung menutup mata terhadap fakta bahwa pengelolaan sampah merupakan arena politik yang sarat dengan relasi kekuasaan, kepentingan, dan ketimpangan sosial-ekologis (Robbins, 2012; Forsyth, 2003).

Studi-studi dalam kerangka ekologi politik menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak pernah netral secara politik. Kerusakan lingkungan, pencemaran, maupun distribusi risiko ekologis merupakan hasil dari proses sosial dan politik yang melibatkan aktor-aktor dengan posisi dan kepentingan yang tidak setara (Blaikie & Brookfield, 1987; Bryant & Bailey, 1997). Dalam konteks pengelolaan sampah, keputusan tentang lokasi TPA, metode pengolahan, serta mekanisme pembuangan limbah pada dasarnya menentukan siapa yang menikmati manfaat kebersihan kota dan siapa yang harus menanggung beban pencemaran. Masyarakat yang tinggal di sekitar TPA sering kali berada pada posisi paling rentan karena harus menghadapi dampak lingkungan secara langsung, meskipun mereka bukan aktor utama penghasil sampah dalam skala terbesar (Davies, 2012; Demaria & Schindler, 2016).

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Sustainable Waste Indonesia (SWI) pada Tahun 2018 terkait Analisis Arus Limbah Indonesia melihat bahwa Indonesia sebanyak 24 persen sampah masih tidak terkelola. Dari sekitar 65 juta ton sampah yang dihasilkan setiap hari, sekitar 15 juta ton mengotori ekosistem dan lingkungan karena tidak dilakukan pengelolaan. Sedangkan 7 persen sampah yang didaur ulang dan 69 persen berakhir di Tempat Pembuangan Akhir.

Di Indonesia, persoalan ini menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya produksi sampah akibat urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan perubahan pola konsumsi. Data menunjukkan bahwa sebagian besar sampah masih berakhir di TPA dengan sistem pengelolaan yang terbatas, sementara upaya pengurangan dari hulu dan pengolahan berbasis komunitas belum berjalan optimal (Mahyudin, 2017). Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah lebih banyak berorientasi pada pemindahan masalah ke ruang tertentu, daripada menyelesaikan persoalan secara struktural. Dalam banyak kasus, TPA berfungsi sebagai ruang penyangga yang menampung residu pembangunan perkotaan, sekaligus menjadi lokasi akumulasi risiko lingkungan yang dialami oleh kelompok masyarakat tertentu (Swyngedouw & Heynen, 2003).

Kehadiran TPA di Polewali Mandar sebagai bentuk kebijakan politik dalam menangani masalah sampah di Kab. Polewali Mandar khususnya TPA Binuang mengantarkan Kab. Polewali Mandar mendapatkan penghargaan Adipura pada Tahun 2019 tersebut. Namun disisi lain TPA Binuang menjadi hal yang kontradiktif karena mendapatkan mendapat penolakan dari masyarakat disebabkan hadirnya TPA ini telah menyebabkan pencemaran lingkungan berupa merembesnya air lindi ke sawah masyarakat dan bau busuk yang timbul dari tumpukan sampah. Pencemaran lingkungan yang timbul akibat pengelolaan sampah di TPA Binuang inilah yang membuat masyarakat melakukan protes kepada pemerintah Kab. Polewali Mandar dan mendesak agar TPA Binuang ditutup.

Sementara itu respons pemerintah kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup Kab. Polewali Mandar ingin melakukan rehabilitasi terhadap TPA Binuang, sesuai dengan arahan Dirjen PSLB3 KLHK dan LHK RI yang melakukan kunjungan ke

lokasi TPA. Hal ini kemudian yang membuat masyarakat semakin keras untuk melakukan penolakan karena merasa tidak dilibatkan dalam menyelesaikan masalah TPA. Masalah lain yang timbul dari pengelolaan sampah di TPA Binuang adalah kebijakan ditutupnya TPA Binuang pada tanggal 8 Juni 2021, oleh Pemerintah Kab. Polewali Mandar yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Binuang akan ditutup pada Desember 2021. Kebijakan ini membuat tidak jelasnya pengelolaan sampah khususnya di Tempat Pemrosesan Akhir.

Kontradiksi yang terjadi pada pengolahan sampah di TPA Binuang menjadi menarik untuk dikaji agar dapat memahani bagaimana dampak kebijakan pengelolaan sampah di TPA Binuang dan hubungannya dengan aspek sosial-ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar TPA.

Beberapa penelitian terkait telah dilakukan oleh para akademisi dan praktisi. Misalnya, Mahyudin (2017) mengkaji permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di TPA dengan menggunakan studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa permasalahan utama pengelolaan sampah adalah kurangnya pengolahan sampah dari hulu ke hilir dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan daur ulang sampah dengan sistem pengelolaan sampah yang berbasis inisiatif komunitas lokal dan tidak hanya mengandalkan TPA dengan sistem lahan urug. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan untuk meningkatkan proteksi TPA agar air lindi tidak mencemari lingkungan.

Penelitian lain dilakukan oleh Aulia et al. (2021) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah mandiri dan penjemputan sampah terpilah di kawasan Situ Pladen, Bogor. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi berupa Pengelolaan Sampah Mandiri dan Penjemputan Sampah Terpilah (Pesan Jepang) dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi, memilah, dan mendaur ulang sampah. Penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan pengetahuan warga Situ Pladen sebesar 42,5% setelah dilakukan intervensi pemberian edukasi tentang pengelolaan sampah.

Penelitian-penelitian di atas memberikan gambaran tentang permasalahan dan solusi pengelolaan sampah di Indonesia, namun masih memiliki beberapa kekurangan. Pertama, penelitian-penelitian tersebut tidak secara spesifik membahas kasus TPA Binuang yang memiliki karakteristik tersendiri. Kedua, penelitian-penelitian tersebut tidak menggunakan pendekatan ekologi politik yang dapat memberikan analisis lebih komprehensif tentang dinamika sosial, ekonomi, dan politik dalam pengelolaan sampah. Ketiga, penelitian-penelitian tersebut tidak memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal TPA Binuang.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk merespons kekurangan-kekurangan tersebut dengan melakukan kajian tentang dampak kebijakan pengelolaan sampah di TPA Binuang dengan pendekatan ekologi politik. Kontradiksi yang terjadi pada pengolahan sampah di TPA Binuang menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, mengapa pengelolaan sampah di TPA Binuang menyebabkan merembesnya air lindi dari TPA ke sawah masyarakat. kedua, mengapa pengelolaan sampah di TPA Binuang menyebabkan polusi udara yang tercium hingga pemukiman penduduk. dua pertanyaan dalam penelitian ini menjadi penting ini untuk melihat bagaimana dampak kebijakan pengelolaan sampah di TPA Binuang di Kab. Polewali Mandar dan menggunakan konsep ekologi politik untuk melihat hubungan antara pencemaran lingkungan yang timbul dari kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Binuang dengan aspek sosial, ekonomi dan politik yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

2. Kajian Literatur

Ekologi merupakan sebuah studi yang berfokus untuk menggambarkan dampak dari hubungan antara manusia dan lingkungan hidup termasuk dengan spesies lainnya. Lebih lanjut, Forsyth (2003) menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada lingkungan ini juga adalah hasil dari hubungan antara manusia dan spesies lainnya. ekologi tidak hanya terbatas pada penjelasan tentang dampak manusia terhadap lingkungannya tetapi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis dalam melihat interaksi manusia secara keseluruhan.

Sementara Ekologi Politik sendiri merupakan istilah yang mencakup berbagai definisi. Menurut Hempel (1996) ekologi politik merupakan studi yang menjelaskan tentang hubungan saling ketergantungan antara unit-unit politik dan lingkungannya, di mana ekologi politik berfokus pada konsekuensi politik dari perubahan lingkungan. Dalam pandangan lain menurut Watts (2000), ekologi politik adalah studi untuk memahami hubungan kompleks antara alam dan masyarakat melalui analisa terhadap bentuk akses dan kontrol atas sumber daya dan pengaruhnya terhadap kesehatan lingkungan dan keberlangsungan kehidupan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekologi politik mengarah pada upaya untuk menggabungkan objek kajiannya pada ekonomi dan politik secara luas yang mencakup hubungan antara masyarakat dan sumber daya, serta hubungan antara kelas dan kelompok sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Sebagaimana dikutip dari Syatori, Ekologi politik merupakan kondisi sosial politik terkait penyebab, pengalaman, dan pengelolaan masalah lingkungan.

Konsep tentang ekologi politik berkembang pada kurun waktu 1960-1970an, di mana kajian yang menggabungkan analisis ekologi dengan politik muncul pada tahun 1960an yang berawal dari kekhawatiran tentang dampak manusia terhadap lingkungannya (Fosyth, 2014). Dari penelitian Neumann (2005) dan Robbins (2003) dapat disimpulkan bahwa ekologi politik berfokus pada dua hal, pertama: ekologi

politik berfokus pada “skala” yang digunakan para ilmuwan dalam melakukan penelitian ekologi politik untuk melakukan identifikasi dan melakukan analisa pada hubungan antara perubahan lingkungan dengan kondisi sosial, politik, budaya dan ekonomi pada ranah konseptual dan fisik. Kedua: berfokus pada implikasi berbagai bentuk kuasa sebagai hal yang penting untuk memahami bagaimana gagasan tentang kesinambungan diciptakan dan disebar.

Asumsi utama dalam ekologi politik menurut Bryant, didasarkan pada pandangan bahwa perubahan lingkungan tidak terjadi secara alamiah, bersifat netral atau berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh politisasi terhadap lingkungan yang melibatkan aktor yang memiliki kepentingan baik ditingkat lokal, regional, maupun global. Ekologi politik melihat bahwa perubahan lingkungan yang terjadi akibat adanya dominasi dari aktor-aktor yang memiliki kepentingan. Aktor yang dominan dalam proses politisasi lingkungan umumnya adalah negara dan swasta. Dominasi ini kemudian menyebabkan akses masyarakat pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam makin dibatasi sehingga akses masyarakat untuk melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lemah sehingga masyarakat semakin marginal. Fenomena dominasi ini kemudian dikena sebagai “tragedy of enclosure”. Tujuan dari analisis yang dilakukan dalam Ekologi politik tidak hanya mencoba untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, tetapi juga memberikan kontribusi analisis yang menjadi fondasi yang penting dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan.

Perubahan lingkungan yang terjadi di suatu wilayah menurut Blaikie (1985) merupakan akumulasi dari berbagai proses sosial, ekonomi dan politik dalam konteks lokal dan di luar wilayah tersebut yang berpengaruh pada persoalan akses dan kontrol atas sumber daya alam di suatu wilayah tertentu. Menurut Blaikie (1985), faktor lokal setempat yang ikut mempengaruhi perubahan lingkungan antara lain adalah proses pengambilan keputusan di dalam kelompok atau komunitas yang bersangkutan, eksistensi dari institusi lokal (aturan adat, norma dan aturan informal lainnya) yang mempengaruhi akses dan kontrol atas pemanfaatan sumber daya alam bagi individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat. Sedangkan faktor-faktor di luar faktor lokal antara lain: kebijakan pemerintah atas penguasaan lahan dan alokasi pemanfaatan sumber daya alam, interaksi antar aktor yang memiliki kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk mendapatkan akses dan kontrol atas sumber daya alam. (Afif, 2009)

Ekologi politik melihat bahwa perubahan lingkungan (baik kerusakan maupun perbaikan) merupakan hasil dari kebijakan ekonomi politik yang muncul dari proses interaksi berbagai aktor dalam suatu wilayah tertentu. Setiap aktor, baik pemerintah, masyarakat, maupun kelompok kepentingan tidak dilihat sebagai kelompok yang monolitik dan homogen di mana perlawanan maupun kerja sama dimungkinkan muncul antara individu atau kelompok baik dalam kategori aktor maupun lintas aktor. Ekologi politik menurut Bryant mendorong pengkajinya untuk mempertanyakan dua hal. Pertama, sejauh mana biaya dan bagaimana ketidaksetaraan distribusi biaya lingkungan ini melanggengkan ketidaksetaraan

ekonomi dan sosial yang sedang berlangsung. Kedua, dalam situasi seperti apa kondisi ketidaksetaraan yang dipengaruhi perubahan lingkungan mempengaruhi proses politik yang ada (Afif, 2009).

Ekologi politik dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana lingkungan dipertimbangkan dalam kebijakan pengelolaan sampah serta untuk melihat bagaimana fenomena perubahan lingkungan dari pengelolaan sampah di TPA Binuang dan hubungannya dengan aspek sosial, ekonomi dan politik masyarakat sekitar TPA Binuang.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di TPA Binuang Desa Paku Kab. Polewali Mandar. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam dampak dari kebijakan pengelolaan sampah di TPA Binuang yang menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan yang menjadi tumpuan hidup masyarakat Desa Paku dan pengaruhnya terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Pemilihan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini tentunya sejalan dengan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Metode ini deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan serta mendeskripsikan mengapa pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Binuang menyebabkan merembesnya air lindi ke sawah masyarakat dan menyebabkan polusi udara yang tercium hingga pemukiman penduduk.

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi langsung. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui secara mendalam masing-masing informan terkait berbagai permasalahan dalam penelitian yang disusun dalam pedoman wawancara. Adapun informan yang dipilih dalam wawancara ini ialah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar untuk memperoleh kajian yang menyangkut pengelolaan persampahan di TPA Binuang. UPTD (Unit Pelaksana Tugas Daerah) TPA Binuang untuk memperoleh informasi terkait proses pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA Binuang. Tokoh masyarakat baik yang tinggal di TPA atau masyarakat yang memiliki informasi terkait hal yang ingin diteliti.

Observasi langsung dilakukan untuk melihat secara lebih dekat dan mendalam terhadap objek yang diamati, serta memeriksa secara detail data yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Untuk menunjang data penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang relevan melalui penelusuran dokumen dan studi literatur. Data ini berasal dari tulisan atau artikel yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. data penunjang ini digunakan untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara yang dilakukan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pertama, data penelitian yang diperoleh dipilah dan dirangkum serta dilakukan pengecekan ulang agar sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang telah di reduksi kemudian disajikan dalam pembahasan permasalahan dalam penelitian ini. Penyajian data dalam penelitian ini dilakuakn dengan bentuk teks naratif. Tahap terakhir setelah data telah direduksi dan disajikan kedalam pembahasan masalah penelitian sebagai makna dari data yang didapatkan, maka selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan untuk menghindari bias.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pengelolaan sampah di TPA Binuang menyebabkan pencemaran lingkungan

Pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA Binuang tidak cukup dipandang sebagai persoalan administratif dan prosedural semata. TPA Binuang juga harus dilihat dari sudut pandang politik, karena TPA Binuang merupakan produk dari kebijakan pengelolaan sampah dan alat yang mewakili pemerintah dalam melaksanakannya tugas pengelolaan sampah. Sehingga seluruh aktivitas yang dilakukan dan berlangsung di TPA Binuang itu mewakili dan menjalankan kewenangan dari Pemerintah Kab. Polewali Mandar khususnya dalam melakukan pengelolaan sampah. Untuk memahami hubungan pemerintah dan masyarakat dalam kebijakan pengelolaan sampah di TPA Binuang maka perlu melihat terlebih dahulu bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Binuang.

Berdasarkan laporan kinerja daerah Kab. Polewali mandar khususnya pada bidang persampahan tahun 2020, Produksi sampah Kab. Polewali Mandar adalah sebanyak 199.54341 m³setiap tahunnya. Sampah perkotaan 660 Ton per tahun, sampah terangkut 77.040m³per tahun, sampah berhasil daur ulang sebanyak 266 ton per tahun. Adapun jumlah sampah yang masuk ke TPA Binuang berjumlah 50 ton per hari sedangkan jumlah sampah yang diproses hanya sekitar 2 - 3 ton per hari. Hal ini dipengaruhi berbagai kendala diantaranya proses pengelolaan sampah yang hanya bertumpu di TPA karena tidak berfungsinya TPS/TPS 3R, kerusakan alat berat, kurangnya SDM, serta minimnya anggaran terlebih pada masa covid-19 yang mengharuskan pemerintah melakukan refocusing anggaran dan sebagainya.

Tidak simbangan antara kemampuan pengelolaan sampah dengan jumlah sampah yang masuk ke TPA menimbulkan tumpukan sampah, terlebih setelah beroperasi selama 10 tahun membuat TPA Binuang mengalami overkapasitas. Tumpukan sampah yang menggunung di TPA Binuang menimbulkan bau tercium hingga pemukiman penduduk. Bau dari tumpukan sampah ini berpengaruh terhadap aktivitas sosial masyarakat Desa Paku.

Selain polusi udara, pencemaran lingkungan yang timbul dari pengelolaan sampah di TPA Binuang ialah merembesnya air lindi dari TPA ke sawah masyarakat. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah sampah dan kebocoran pada kolam air lindi. Pengelolaan air lindi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi salah satu aspek yang penting dalam pengolahan limbah untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan sampah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pengelolaan air lindi di TPA Binuang dilakukan dalam kolam air lindi. Air lindi yang berasal dari pengelolaan sampah mengandung bahan organik dan zat terlarut yang harus diolah sebelum dibuang atau digunakan kembali. Proses pengolahan dilakukan melalui pengendapan dan penyaringan dapat dilakukan untuk menghilangkan partikel padat dan mengurangi konsentrasi bahan organik dalam air lindi. Setelah itu air lindi kemudian diolah untuk menghilangkan polutan yang masih ada agar kandungan polutan dalam air lindi sesuai dengan persyaratan atau baku mutu air yang telah ditetapkan. Air lindi yang telah melalui proses pengolahan kemudian dibuang melalui saluran air yang terhubung langsung dengan saluran irigasi yang digunakan untuk mengairi lahan persawahan masyarakat. Proses pengelolaan air lindi di TPA Binuang juga dilakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan air lindi tidak melebihi kadar baku mutu yang ditetapkan.

Sejak awal beroperasi, air lindi dari TPA Binuang memang dialirkan menuju irigasi yang digunakan oleh masyarakat untuk mengairi lahan persawahan. Setelah beberapa tahun beroperasi, air lindi dari proses pengolahan sampah di TPA Binuang kemudian dikeluhkan oleh masyarakat Desa Paku karena telah mencemari lingkungan. Air lindi dari pengelolaan sampah TPA Binuang merendam persawahan masyarakat dan berlangsung sepanjang hari karena sistem irigasi di yang mengairi lahan masyarakat tidak memiliki pintu mekanis.

Pencemaran lingkungan yakni merembesnya air lindi dari TPA Binuang ke sawah masyarakat, serta polusi udara yang tercium hingga pemukiman penduduk yang timbul dari pengelolaan sampah di TPA Binuang berdampak pada 4 (empat) aspek

4.2 Dampak pada kehidupan ekonomi

Merembesnya air lindi dari TPA Binuang ke areal persawahan mempengaruhi kualitas padi yang ditanam petani. Padi yang ditanam pada sawah yang terendam air lindi dari TPA Binuang tumbuh subur namun menjelang berbuah, kebanyakan padi rebah disebabkan akar padi tercabut karena tanah yang terlalu gembur. Selain itu polusi udara yang berasal dari TPA Binuang menimbulkan hama berupa lalat dan tikus yang membuat pengurangan produksi petani, baik penurunan kualitas maupun kuantitas hasil panen. Penurunan kualitas padi dan kakako ini juga sejalan dengan penurunan hasil panen dan pendapatan para petani.

4.3 Dampak terhadap kualitas kehidupan individu, kelompok masyarakat yang bersifat non-ekonomis

Merembesnya air lindi dari TPA ke sawah masyarakat menimbulkan masalah kesehatan berupa gatal dan ruam pada petani yang terkena paparan air lindi ketika melakukan aktivitas di sawahnya. Sementara Polusi udara membuat aktivitas sosial masyarakat berkurang akibat tidak nyaman beraktivitas akibat bau. Hal ini tentunya dapat berpengaruh pada solidaritas sosial masyarakat.

4.4 Dampak terhadap sikap publik.

Merembesnya air lindi dan polusi udara dari TPA juga berpengaruh pada sikap publik, yaitu timbulnya protes penolakan dan penutupan TPA Binuang yang dilakukan masyarakat disebabkan merembesnya air lindi TPA dan polusi udara dari TPA Binuang ini berpengaruh pada mata pencaharian yang juga berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat.

4.5 Dampak terhadap proses pembuatan kebijakan.

Dampak merembesnya air lindi dan polusi udara dari pengelolaan sampah di TPA Binuang pada proses pembuatan kebijakan ini dihadapi Pemerintah Kab. Polewali Mandar yang kemudian mengalami dilema dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan sampah di TPA Binuang. Disatu sisi pemerintah harus melakukan pengelolaan sampah yang menjadi kewajibannya untuk melakukan pelayanan dasar, khususnya dalam penanganan sampah. Disisi lain, jika pengelolaan sampah di TPA Binuang dilanjutkan akan mendapatkan protes dan penolakan dari masyarakat. hal ini membuat waktu dan biaya yang diperlukan dalam mengambil kebijakan juga semakin besar.

4.5 Tindak lanjut pengelolaan sampah di TPA Binuang.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Binuang membuat masyarakat Desa Paku melakukan tuntutan kepada Pemerintah Kab. Polewali Mandar untuk mengatasi masalah yang timbul akibat pengelolaan sampah di TPA Binuang. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paku dilakukan sejak tahun 2018. Menindaklanjuti tuntutan masyarakat Desa Paku, Pemerintah Kab. Polewali Mandar serta Dinas Lingkungan Hidup melakukan kunjungan untuk melihat secara langsung dampak yang terjadi akibat pengelolaan sampah yang ada di TPA Binuang dan berdiskusi dengan masyarakat Desa Paku membahas tentang tindak lanjut dari pengelolaan sampah yang ada di TPA Binuang. Dari pertemuan tersebut, lahir kesepakatan bahwa Pemerintah harus membenahi masalah yang pengelolaan sampah yang terjadi mulai dari fasilitas pengangkut sampah, jam operasional, hingga pengelolaan lanjutan di TPA Binuang termasuk meminimalisir dampak pencemaran terhadap lingkungan.

Dua tahun kemudian, masyarakat desa paku merasa tidak ada perbaikan terhadap pengelolaan TPA Binuang, sebaliknya merasa dampak yang dirasakan dari TPA Binuang itu makin parah, seperti bau dari tumpukan sampah yang tercium hingga pemukiman penduduk. Hal ini berdampak pada berkurangnya aktivitas sosial masyarakat Desa Paku. Masyarakat Desa Paku kemudian semakin keras dalam melakukan tuntutan penutupan TPA Binuang. Tuntutan ini kemudian ditanggapi oleh Pemerintah Kab. Polewali Mandar bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UPTD TPA Binuang berdiskusi dengan masyarakat. kemudian bersama dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (P3ESM-KLHKRI) melakukan pemantauan dan kajian indeks risiko terhadap pengelolaan sampah di TPA Binuang.

Berdasarkan berita acara hasil evaluasi Tim Penilai Indeks risiko TPA Binuang dengan nomor: 01/BA/TPA-BINUANG/X/2021, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 2021, TPA Binuang memperoleh indeks risiko sedang dengan skor 402,50. Menindak lanjuti hal ini, maka P3ESM-KLHK RI merekomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi terhadap TPA Binuang, sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga mengeluarkan surat rekomendasi terhadap TPA Binuang dengan No.: 1609.03../760/X/2021 untuk mendesak Pemerintah Kab. Polewali Mandar segera menindaklanjuti rekomendasi rehabilitasi tersebut. Pemerintah Kab. Polewali Mandar kemudian menyampaikan hasil kajian indeks resiko TPA dan rekomendasi rehabilitasi TPA Binuang kepada masyarakat Desa Paku. Tetapi masyarakat Desa Paku tetap menolak adanya rencana rehabilitasi terhadap TPA Binuang ini karena merasa tidak dilibatkan dalam proses kajian terhadap kondisi TPA Binuang sementara yang merasakan dampak langsung dari TPA Binuang adalah masyarakat Desa Paku. Setelah dikeluarnya kebijakan berupa rekomendasi untuk merehabilitasi kondisi TPA Binuang, masyarakat Desa Paku semakin keras dalam melakukan desakan untuk menutup TPA Binuang, Masyarakat Desa Paku menganggap tidak ada perubahan yang signifikan, sampah tetap masuk ke TPA sementara belum ada pelaksanaan rehabilitasi terhadap kondisi TPA Binuang. Setelah itu masyarakat kemudian memblokir dan membuat pos penjagaan di jalan menuju TPA Binuang untuk menghindari adanya penambahan jumlah sampah di TPA Binuang, hal ini berlangsung selama dua minggu.

Penutupan akses menuju ke TPA Binuang menimbulkan tumpukan sampah di beberapa kecamatan, terutama di Kec. Wonomulyo. Merespon hal ini, Pemerintah Kab. Polewali Mandar membangun komunikasi dengan warga Desa Paku agar membuka blokade menuju ke TPA Binuang, namun masyarakat Desa Paku semakin keras untuk menolak. Melihat potensi konflik sosial yang besar, Bupati Polewali mandar kemudian mengeluarkan surat penutupan TPA Binuang pada tanggal 8 Juni 2021 dengan Nomor P.13/BUPATI/660/06/2021 tentang penutupan TPA Binuang yang akan ditutup bulan Desember 2021.

Setelah TPA Binuang ditutup, tidak ada pengolahan sampah akhir yang dilakukan. Sampah yang ada kemudian dibawa ke Kel. Ammassangang untuk di timbun menggunakan metode sanitary landfill yang kemudian sampah akan ditutup dengan sampah kemudian akan dibangun lapangan sepakbola. Kebijakan ini diambil sebagai langkah darurat untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di Kab. Polewali Mandar, tetapi hal ini juga belum cukup untuk mengatasi jumlah sampah yang bertumpuk. Hal ini tentunya memerlukan kajian lingkungan lebih jauh untuk menghindari kemudian dampak yang tidak diharapkan. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa aspek lingkungan belum menjadi fokus utama dalam pengambilan kebijakan.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa dampak kebijakan pengelolaan sampah di TPA Binuang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekologi politik, yaitu:

(1) Adanya dominasi Pemerintah terhadap masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPA Binuang.

Pengelolaan sampah di TPA Binuang jika ditinjau dari konsep ekologi menurut Bryant, pencemaran lingkungan akibat dari pengelolaan sampah yang terjadi di TPA Binuang dikenal sebagai "tragedy of enclosure" atau kondisi dimana adanya aktor dominan dalam politisasi lingkungan tanpa memperhatikan dampak negatif pada sumber daya tersebut. Bryant menjelaskan bahwa perubahan lingkungan terjadi akibat adanya dominasi dari aktor-aktor yang memiliki kepentingan yang menyebabkan akses masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya menjadi lemah sehingga masyarakat menjadi marjinal. Aktor yang dominan dalam proses politisasi lingkungannya umumnya adalah negara dan swasta merujuk pada pembatasan atau pengurangan akses terbuka yang umumnya ada pada sumber daya alam, seperti pengaturan hak kepemilikan pribadi, pembatasan akses, atau privatisasi.

Pengelolaan sampah di TPA Binuang berdasarkan Teori Ekologi Politik Bryant & Bailey, masalah yang terjadi pada pengelolaan sampah di TPA Binuang terjadi akibat adanya dominasi yang terjadi atas politisasi lingkungan hidup disebabkan karena negara (pemerintah) memiliki peran ganda yakni sebagai pelindung dan pengguna sumber daya. Peran ganda inilah yang kemudian membuat pemerintah berada dalam konflik kepentingan. Hal ini juga terjadi pada pengelolaan sampah yang terjadi di TPA Binuang. Dimana Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pelindung lingkungan hidup sekaligus sebagai pengguna, namun dalam pengelolaannya, peran dan partisipasi masyarakat minim sehingga dalam proses pelaksanaan pengelolaan sampah ini di kritik dan mendapatkan penolakan dari masyarakat karena pengelolaan sampah justru makin kompleks, disisi lain pemerintah belum dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara maksimal karena tumpang tindih antara wewenang Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Lambatnya respon pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi masalah pengolahan sampah di TPA Binuang, pemerintah

berfokus pada aspek-aspek lain yang menjadi prioritas dalam kepentingan pembangunan daerah utamanya pada masa penanganan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemerintah melakukan refocusing anggaran. Sementara Pemerintah Kab. Polewali Mandar dalam posisi dilema disebabkan semua masalah yang timbul dari pengolahan sampah di TPA Binuang dibebankan kepada pemerintah Kabupaten sebagai penanggung jawab langsung karena berada dalam wilayahnya.

Dalam pengelolaan sampah di TPA Binuang, aktor yang dominan dalam proses politisasi lingkungan adalah Pemerintah Kab. Polewali Mandar khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta UPTD TPA Binuang yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian lingkungan hidup dan kebersihan, sekaligus penanggung jawab TPA Binuang. Sedangkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPA Binuang sangat minim, hal ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana juga rusaknya fasilitas di TPA yang membuat masyarakat terbatas dalam memanfaatkan dan mengelola sampah sebagai sumberdaya. Masyarakat hanya dilibatkan untuk melakukan pemilahan sebagai pemulung dimana hal ini berangkat dari inisiatif masyarakat secara mandiri. Bukan diinisiasi dan diberdayakan oleh UPTD TPA Binuang atau Dinas Lingkungan Hidup. Inilah yang menjadi faktor sehingga kebanyakan sampah yang masuk ke dalam TPA Binuang tidak dapat dikelola secara maksimal dan menyebabkan tumpukan sampah yang pada akhirnya mencemari lingkungan.

(2) Pandangan Masyarakat dan pemerintah terhadap pengelolaan sampah.

Faktor lain yang mempengaruhi kondisi pengelolaan sampah di TPA binuang ialah pengetahuan dan pandangan terhadap pengelolaan sampah. baik masyarakat maupun pemerintah masih bersifat antroposentris dalam memandang pengelolaan sampah. Pemerintah Kab. Polewali Mandar khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta UPTD TPA Binuang hanya melihat pengelolaan sampah sebagai kewajiban, Pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian lingkungan hidup dan kebersihan, sekaligus penanggung jawab TPA Binuang, sehingga mendominasi proses pengelolaan sampah. Sedangkan masyarakat melihat pengelolaan sampah sebagai hak dasar yang harus mereka dapatkan dari pemerintah sehingga masyarakat belum bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Hal ini timbul karena minimnya edukasi dan pendidikan lingkungan khususnya tentang bahaya sampah yang membuat masyarakat semakin marjinal atau semakin minim partisipasinya dalam pengelolaan sampah.

Masyarakat desa Paku sebagai aktor dalam pengelolaan sampah yang juga merasakan dampak dari pengelolaan TPA mereka merasa tidak dilibatkan dalam pengelolaan sampah yang berada di wilayah desa mereka, bahkan untuk membuang sampah di TPA sekalipun karena tidak membayar retribusi. Meskipun lahan TPA Binuang dimiliki oleh pemerintah, namun dampak yang

timbul dari pengelolaan sampah di TPA Binuang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pengetahuan dan pandangan masyarakat dalam pengelolaan sampah penting untuk diperhatikan sebab mempengaruhi tindakan mereka dalam pengelolaan sampah. Hal ini dapat diamati pada bagaimana posisi lingkungan dalam negosiasi kebijakan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. dapat dilihat bahwa konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat itu hanya berfokus pada pemenuhan hak masing-masing. Sementara sampah dan keberlanjutan lingkungan belum menjadi perhatian utama baik dari masyarakat maupun pemerintah. ini terlihat dari kebijakan penutupan TPA Binuang tanpa adanya tindak lanjut atau rehabilitasi pasca ditutupnya TPA, hanya ditinggalkan begitu saja. Maka dalam hal ini menurut Bryant, lingkungan hidup sering kali menjadi korban demi kepentingan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Sedangkan konsep keberlanjutan lingkungan dalam kebijakan lingkungan harusnya menyeimbangkan tiga hal yakni aspek ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan aspek sosial budaya.

(3) Resistensi dan gerakan sosial dari masyarakat sekitar.

Pencemaran lingkungan yang timbul dari pengelolaan sampah di TPA Binuang memberikan dampak pada aspek sosial-ekonomi masyarakat Desa Paku. Hal ini membuat masyarakat Desa Paku melakukan tuntutan penutupan TPA Binuang. hal ini jika dilihat dari Ekologi Politik, terjadi karena adanya upaya untuk mempertahankan mata pencaharian dan perlindungan lingkungan. Pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah di TPA Binuang justru mempengaruhi sistem mata pencaharian masyarakat.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan pengelolaan sampah di TPA Binuang belum mencerminkan prinsip-prinsip ekologi politik yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini dapat diamati pada bagaimana posisi lingkungan dalam negosiasi kebijakan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Dapat dilihat bahwa konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat itu hanya berfokus pada pemenuhan hak masing-masing. Kondisi ini membuat pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA tidak optimal, sehingga menimbulkan dampak yang mengorbankan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat sekitar TPA Binuang.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam mengisi kesenjangan penelitian tentang dampak kebijakan pengelolaan sampah dengan pendekatan ekologi politik. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aspek teknis, administratif dan lingkungan dari pengelolaan sampah, tanpa memperhatikan aspek sosial dan politik yang juga berpengaruh dalam pengelolaan sampah.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengelola sampah, serta dampak-dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan pengelolaan sampah bagi masyarakat sekitar.

Daftar Pustaka

- Agustina, N., Irianty, H., & Wahyudi, N. T. (2017). Hubungan Karakteristik Petugas Kebersihan Dengan Pengelolaan Sampah Di Puskesmas Kota Banjarbaru. *Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 4(2), 66-74.
<https://doi.org/10.20527/jpkmi.v4i2.3843>
- Arsel, M. (2009). Ekologi Politik: Dimana Ekonominya? *Jurnal Tanah Air*, 10(1), 12-17.
- Aulia, D. C., Situmorang, H. K., Prasetya, A. F. H., Fadilla, A., Nisa, A. S., Khoirunnisa, A., ... & Lubis, R. F. (2021). Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah dengan Pesan Jepang. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Pengmaskemas)*, 1(1).
- Blaikie, P. (1985). *The political economy of soil erosion in developing countries*. London: Longman.
- Blaikie, P., & Brookfield, H. (1987). *Land degradation and society*. London: Methuen.
- Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). *Third world political ecology*. London: Routledge.
- Davies, A. R. (2012). Geography and the matter of waste mobilities. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 37(2), 191-196.
- Demaria, F., & Schindler, S. (2016). Contesting urban metabolism: Struggles over waste-to-energy in Delhi, India. *Antipode*, 48(2), 293-313.
- Forsyth, T. (2005). *Critical political ecology: the politics of environmental science*. In Routledge, Taylor & Francis e-Library.
- Robbins, P. (2012). *Political Ecology: A Critical Introduction Second Edition*. In John Wiley & Sons, Ltd.
- Suraya Afif. (2009). Pendekatan Ekologi Politik: Sebuah Pengantar. *Tanah Air*, 10(1), 18-33.
- Swyngedouw, E., & Heynen, N. (2003). Urban political ecology, justice and the politics of scale. *Antipode*, 35(5), 898-918.

Syatori, A. (2014). Ekologi Politik Masyarakat Pesisir (Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial-ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa Citemu Cirebon). Jurnal Holistik, 15(2), 241.

Timothy Forsyth, "Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science", Progress in Development Studies", 2005, hlm 4-5.

Waste4change. (2020). Fasilitas Pengelolaan Sampah TPS, TPS 3R, TPST, dan TPA beserta Fungsinya. In Waste4Change.Com.
<https://waste4change.com/blog/fungsi-tps-tps-3r-tpst-dan-tpa/>